



**Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi Untuk Pangreh Praja
(Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren-Osvia)
Di Serang–Banten Tahun 1900–1927**

Usmaedi

usmaedikentlee@gmail.com

STKIP Setia Budhi Rangkasbitung

Abstract

Indigenous School Education Officer for Civil-directed, School Opleiding voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) in Serang Banten years 1900-1927. This research is based on a system of government that the Dutch East Indies in the program directed by the Government is required to be able to perform administrative tasks in the province but because of the high officials who have to come from the Netherlands to the Dutch government established a school to meet educational officials natives in the province. The purpose of this thesis writers to learn the system of government in the province with the native elite-modern with the traditional school as a condition for becoming a regent. The method that I use the method of Historical done through several stages, namely: (1) Heuristics, (2) criticism, (3) interpretation, (4) Historiography. While the techniques used to obtain data through library research by studying and analyzing various resource books, newspapers, interviews and archival materials related to the issues discussed. The results reveal that the purpose of recruitment administration in Banten just to get the officer natives are very cheap and the Dutch government considers important role for indigenous political elite bureaucracy native is an intermediary between the government and the people using its traditional authority. So the Dutch government established a school to become an administrative officer at the school named Banten OSVIA. After the establishment of the school in Serang Banten OSVIA traditional governance with the pedigree of the king replaced by a modern system which breeds not be the main requirement to be governor, but education has to be provided to the regents, in which a minimum standard of education graduates OSVIA and able to speak Dutch. Thus the author can give lessons to the community and fellow students with thesis title so that I can learn a transitional government would be traditional-modern in Banten after the arrival of the Dutch.

Keywords: *school, regent, inlandsche ambtenaren*

Abstrak

Penelitian ini berdasarkan pada sistem pemerintahan Hindia Belanda yang diarahkan oleh pemerintahan untuk memenuhi tugas administrasi provinsi, tetapi karena tingginya pekerja yang harus didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka didirikanlah sekolah untuk memenuhi pejabat pribumi yang ditempatkan di provinsi.

Tujuan dari penelitian ini ialah mempelajari sistem pemerintahan di provinsi dengan elit pribumi yang merupakan lulusan sekolah tradisional yang merupakan syarat menjadi seorang bupati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode historis dengan tahapan sebagai berikut: (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi (4) Historiografi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literasi, dengan menganalisis sumber buku, koran, wawancara dan arsip-arsip yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan dari rekrutmen administrasi di Banten hanya untuk mendapatkan petugas pribumi yang sangat murah dan pemerintah Belanda menganggap pekerja tersebut sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat melalui kewenangan tradisionalnya. Maka pemerintah Belanda mendirikan sebuah sekolah yang tujuannya untuk menghasilkan tenaga administrasi, sekolah bernama OSVIA. Setelah berdirinya sekolah OSVIA di Serang –Banten dengan sistem yang modern bukan lagi menjadi syarat utama menjadi Gubernur, tetapi harus juga diberikan kepada bupati dimana standar minimum OSVIA ialah mampu menguasai bahasa Belanda. Dengan demikian penulis dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan pelajar, bahwa terdapat pemerintahan transisi di Banten setelah kedatangan Hidia Belanda.

Kata Kunci : *sekolah, bupati, sekolah pribumi*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pada masa penjajahan Belanda, tahun 1834 daerah kesultanan Banten dijadikan sebagai suatu karesidenan yang meliputi Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak. Jabatan mulai dari *Residen* hingga seorang *Kontrolir* selalu dipegang oleh orang Belanda. Sedangkan jabatan mulai dari Bupati ke bawah dipegang oleh orang pribumi.

Sistem pendidikan yang terjadi masa Pemerintahan Hindia Belanda di Jawa Barat baru didirikan pada tahun 1850, yakni sekolah kelas I. Sekolah hanya diperuntukan bagi anak-anak lingkungan Pangreh Praja dan ditempatkan di ibu kota *Karesidenan*, seperti Serang, Bogor, Bandung, dan Cirebon. Tahun berikutnya, 1951 didirikan sekolah kelas II yang sifatnya lebih sederhana dan rendah. Kedua kelas ini tidak memiliki sambungan dengan sekolah yang lebih tinggi. Baru pada tahun 1875 di Jawa Barat didirikan sekolah *Hoofdenschool* sehingga lulusan kelas I dapat diterima menjadi murid yang dapat menjadi calon Pangreh Praja (Departemen Kebudayaan dan, 2006). Keputusan pemerintah pada tahun 1852 mengenai pendidikan untuk pribumi diterapkan pada dua prinsip bahasa yaitu bahasa daerah dan tiga aksara harus dipakai di daerah Priyangan seperti: bahasa Melayu dalam aksara Latin dan Arab, bahasa Sunda dalam aksara Jawa.

Sistem pendidikan di Banten sebelum kedatangan Kolonial Belanda dilakukan di pesantren atau langgar yang berada disekitar rumah penduduk. Mayoritas masyarakat Banten memeluk agama Islam, sehingga pendidikan orang pribumi hanya sebatas mempelajari ilmu-ilmu agama Islam.

Tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh *Van Deventer* dengan judul *Hutang kehormatan* dalam majalah *De Gids*. Di dalam artikel tersebut *Van Deventer* mengemukakan keuntungan dari Hindia Belanda selama ini seharusnya dibayar ke Negara. Dampak/pengaruh dari artikel *Deventer*, Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan *Politik Etis* atau Politik Balas Budi merupakan suatu pemikiran yang meberikan pernyataan bahwa Pemerintah Kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap Politik Tanam Paksa. Tahun 1900 Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh *Pieter Brooshooft* (wartawan *Koran De Locomotief*) dan *C. Van Deventer* (politikus) ternyata membuka mata Pemerintah Kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib pribumi yang kehidupannya terbelakang. 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan di dalam pidatonya pembukaan di Parlemen Belanda, bahwa Pemerintah Belanda merasa memiliki panggilan moral dan hutang budi (*een eerschuld*) di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan Politik Etis, yang terangkum dalam program *Trias Politika*. Program pertama merupakan *Irigasi* (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Program kedua *Emigrasi* yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi, penduduk yang pada di dalam suatu wilayah diajak untuk bertransmigrasi sehingga lahan untuk kerja tidak hanya berpusat di satu tempat. Program yang terakhir bidang pengajaran dan pendidikan (*Edukasi*).

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran serta di pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan akses pendidikan dan di wilayah Hindia Belanda (Burke, 2001). Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa adalah *Mr. J.H. Abendanon* (1852-1925) Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Perkembangan pendidikan di Banten pada masa Kolonial sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Banten karena pendidikan yang diberikan oleh Belanda sangat penting. Masa Hindia Belanda mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan Barat. Kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih baik. Dengan demikian sistem pendidikan modern baru

dikembangkan di wilayah Banten pada awal abad ke-20 ketika ada gerakan politik etis.

Pendirian sekolah-sekolah di Banten pada awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda yang orang tuanya bekerja di daerah *Karesidenan* di Banten, baik yang bekerja di pabrik atau bekerja sebagai Pegawai Pemerintahan di Hindia Belanda. Sekolah untuk golongan pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda terdapat di Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Rangkasbitung. Anak-anak pribumi bisa sekolah di Bumiputera (*Inlandsche School*) kelas dua (*Tweede Klasse*) atau yang dikenal dengan *Sekolah Angka Loro*, atau di Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (*Volksschool*). Sekolah Desa pertama didirikan di Hindia Belanda tahun 1907. Sekolah semacam ini pada awal abad ke-20 jumlahnya sudah cukup banyak di *Karesidenan* Banten.

Pendirian sekolah-sekolah Barat di Karesidenan Banten memiliki peranan yang sangat penting dalam melahirkan elit modern. Mereka adalah kelompok terpelajar yang ikut berperan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjalankan fungsinya ketika sebagian besar masyarakat pribumi belum bisa mengenyam pendidikan modern. Fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh elit modern di Banten antara lain sebagai dokter, guru, juru rawat, dan lain-lain. Bupati-bupati di *Karesidenan* Banten pada abad ke-20 adalah elit terpelajar. Hasil didikan sekolah barat, seperti Bupati Banten Lor Ahmad Djajadiningrat alumni *Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera di Serang Banten. Tetapi sebelum sekolah di OSVIA, Lor Ahmad Djajadiningrat memperoleh pendidikan di pesantren dan kursus privat mengenai cara menulis dan membaca huruf Belanda. Setelah bekerja dan selanjutnya melanjutkan pendidikan ke *Bestuurschool* di Jakarta.

Walaupun nampak cukup baik tujuan didirikan bentuk-bentuk persekolahan di Hindia Belanda, namun dalam prakteknya, terdapat kecenderungan diskriminatif. Kecenderungan itu nampak dalam hal cara menyaring masih anak sekolah. Caranya dengan memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal, dan juga sering diutamakan bagi keluarga keturunan darah biru (darah Ningrat, darah Kraton) atau dari kalangan para “priyayi” (Pangreh Praja atau Pegawai kantor Pemerintahan Hindia Belanda). Oleh karena itu, bagi kalangan masyarakat bawah, hanya dari anggota masyarakat yang mampu atau kaya saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda tidak murni semata-mata sebagai pemberdayaan pendidikan kepada masyarakat, melainkan untuk

menghasilkan tenaga birokrat (level pendidikannya) untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di Pemerintahan Kolonial Belanda. Sebagai contoh, sejak tahun 1864 oleh Belanda telah meintroduksi sebuah program ujian yang disebut *Klein Ambtenaars' Examen*, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh oleh seseorang agar dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Oleh karena itu, nampak jelas bahwa program untuk menciptakan birokrat rendahan cukup menonjol, apalagi setelah tahun 1900 diperkenalkan sekolah *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)*, yaitu sebuah sekolah yang dipersiapkan menjadi pegawai pemerintah untuk kalangan pribumi. Dengan demikian terdapat kesan bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk kelancaran ekonomi dan politik Belanda.

Pendidikan para Pangreh Praja Belanda diterapkan pertama di Akademi Kerajaan (*Koninklijke Akademie*) di Delft 17 Juli 1842 berdasarkan Keputusan Raja. Kemudian karena perkembangan yang cukup pesat di jajahan, Pemerintah Belanda memutuskan untuk melibatkan universitas terkemuka: Leiden dan Utrecht sebagai tempat mendidik para calon Pangreh Praja (Van der Wal, 2001).

Tahun 1879 pembangunan sekolah oleh pemerintah di Bandung dilakukan dengan nama *Opleidings-school Voor Inlandsche ambtenaren (OSVIA)* di Bandung, masa pendidikannya selama lima tahun. Saat itu kalangan penduduk pribumi menyebutnya sebagai “Sukola Menak”. Maklum, murid sekolah itu adalah anak para priyayi seperti Bupati, Patih dan Wedana. Murid OSVIA adalah lulusan sekolah dasar kelas I.

Pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Banten hanya ada 2 sekolah dimana Serang merupakan daerah yang dapat mengawasi daerah lain, sehingga dapat dibentuk OSVIA untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pegawai Hindia Belanda di Serang. Tujuan pendirian lembaga pendidikan oleh Belanda adalah untuk mendidik tenaga kerja yang akan mengerjakan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda,. Kepentingan untuk mencari pegawai yang murah agar dapat dijadikan pegawai tanpa mendatangkan pegawai dari Negeri Belanda. Oleh karena itu, Belanda membentuk sekolah Pangreh Praja untuk memenuhi kebutuhan pegawai dengan harga yang murah. Belanda kemudian mendirikan sekolah Pangreh Praja di Serang Banten.

Belanda berkeinginan memajukan pemerintahan tenaga bumiputera diangkat menjadi kepala pemerintahan berdasarkan keturunan, di Banten banyak keturunan berasal dari sebuah kerajaan, maka Belanda mendirikan sebuah sekolah untuk anak anak raja yang disebut OSVIA. Sekolah tersebut diperuntukan bagi anak-anak raja dimana sistem pendidikan di OSVIA menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu dan Bahasa Belanda. Tujuan

sekolah ini nantinya akan menjadi pegawai di Hindia Belanda sebagai “*Regent*” (Bupati).

Kedudukan yang diterima sebagai pegawai pemerintah sangat dihargai pada zaman Kolonial yang birokratis. Pegawai pemerintah merupakan pendukung otoritas kekuasaan pemerintah Belanda. Jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan bagi kaum pribumi di pemerintahan atau perusahaan barat dengan bersekolah di OSVIA, sehingga sekolah persiapan menjadi pegawai di Pemerintahan Hindia Belanda.

Metode

Masalah penelitian adalah tentang penyelenggaraan pendidikan pada masa Kolonial Belanda di Serang Banten pada tahun 1900-1927. Metode penelitian yang dipakai metode sejarah (*Historical Methode*). Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis, rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986). Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu kegiatan pengumpulan data berhubungan dengan judul penelitian. Menghimpun sumber, serta informasi yang valid dan otentik agar kredibilitas sumber dan kelayakan materi.

Prosedur kerja seorang sejarawan, langkah pertama menyusun sebuah cerita sejarah adalah menemukan jejak sejarah. Dalam metode sejarah, kegiatan ini disebut heuristik. Kata heuristik dalam bahasa Yunani “*heurisken*” berarti menemukan, maksudnya mencari serta menemukan jejak-jejak sejarah (Widja, 1988) .

Heuristik penelitian menggunakan teknik-teknik yang bersifat primer dan sumber sekunder antara lain:

(1) Sumber Primer

Merupakan kesaksian dari seseorang yang menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah (Gottschalk, 1986). Sumber primer berupa orang, tulisan yang memiliki keaslian, orang pertama, dikisahkan dari orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah.

(2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun bukan merupakan saksi mata dalam peristiwa sejarah. Dengan perkataan lain, sumber yang berasal dari orang yang bukan saksi hidup atau tidak seaman dengan peristiwa yang sedang diteliti. Informasi tentang sumber-sumber sejarah baik primer maupun sumber sekunder, maka diperlukan teknik sebagai berikut:

(a) Wawancara

Bertujuan untuk mendapatkan sumber sejarah dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dari para pelaku sejarah ataupun saksi sejarah. Selain itu wawancara merupakan alat mengumpulkan informasi tanggapan pribadi, pendapat atau opini serta keyakinan. *Interview*, mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu (Gottschalk, 1986).

(b) Studi pustaka

Studi pustaka untuk menggumpul dan menjawab masalah penelitian. Bahan-bahan yang ditelaah adalah buku yang berhubungan dengan Sejarah Sekolah OSVIA di Serang Banten merupakan basis kegiatan pendidikan Pangreh Praja pada masa Kolonial tahun 1900-1927. Buku lain, Sejarah Pendidika, Pengantar Pendidikan, LimaPuluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten di Serang di Jl. Saleh Baimin No. 6. Buku yang berisi himpunan seperti: Kebudayaan Jawa, Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Sejarah dan Silsilah Ringkas Para Sinuhunan Kesultanan Banten. Berbagai koleksi Perpustakaan Nasional RI di Jakarta antara lain buku; Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ibukota Negara, Jakarta. Kunjungan dari beberapa perpustakaan dan arsip ini, penulis mengumpulkan beberapa buku yang menunjang permasalahan penelitian. Buku-buku yang lain seperti: Memori Serah Jabatan 1921-1930, Sejarah Pendidikan di Daerah Jawa Barat, Sejarah Pendidikan Swasta di Indonesia Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi, Tradisi & Transformasi Sejarah Sunda *Kolonial Verslag* dan Arsip *Binnenlandsch Bestuur*. Sejumlah buku yang didapat dinamakan sumber sekunder karena penulis mendapatkan data-data dari daftar katalog pustaka, website seperti www.wikipedia.org, serta Sumber yang dikumpulkan juga di dapat dari hasil penelitian ke Gedung OSVIA yang sudah beralih fungsi menjadi Markas Besar Polres Serang, sumber primer dimana penulis menggali sumber kepada fakta yang sesuai dengan data yang didapat dari lapangan. Buku lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

(c) Studi dokumen (tertulis)

Cara mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis, sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti buku, Koran, Majalah atau yang sejenis disebut dengan studi dokumentasi. Studi dokumen adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar, dan arkeologis. Dokumen dapat berwujud dalam bentuk objek tertulis atau yang lainnya. Dokumen tertulis berupa catatan mengenai sejarah Sekolah OSVIA, maupun sumber yang tidak tertulis berupa foto. Selain dari arsip, dari hasil penelitian, terhadap sumber yang mampu memberikan sumbangan dalam melengkapi melengkapi data yang dibutuhkan.

2. Kritik

Kritik merupakan tahapan/kegiatan meneliti yang memberikan informasi terhadap daftar pustaka sebagai acuan. Setelah menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak sejarah, dan dilakukan kritik sumber. Kritik sumber sebagai menilai, menguji dan menyeleksi jejak sejarah sebagai usaha mendapatkan sumber yang benar, asli dan relevan. Kritik sumber ini bermaksud menentukan kredibilitas dari jejak-jejak sejarah (Widja, 1988).

Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal antara lain:

1 Kritik Internal

Apabila sumber yang diperoleh itu merupakan sumber asli, maka langkah selanjutnya yaitu mengecek kembali, layaknya suatu dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai data. Meliputi pengertian kata-kata, pernyataan yang di tulis termasuk menentukan kredibilitas pernyataan penulis sehingga sumber tersebut benar-benar dapat dipercaya.

2 Kritik Eksternal

Dalam hal ini perlu kritik eksternal adalah di cek atau menesteliti di dalam suatu dokumen yang dapat diterima sebagai bukti, apakah suatu dokumen tersebut benar-benar sesuai dengan yang ditulis didalamnya dan sama dengan aslinya. Kritik eksternal bertujuan untuk menetapkan otentik tidaknya atau asli tidaknya sumber yang dipakai. Kritik eksternal berusaha menjawab pertanyaan tentang ke otentikan dan keaslian sumber yang digunakan (Notosusanto & Poesponegoro, 1975).

3. Interpretasi

Setelah kritik sumber dikerjakan, maka jejak-jejak sejarah yang berhasil didapatkan itu biasa diwujudkan sebagai fakta sejarah (Widja, 1988). Interpretasi atau sintesis merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan carameninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat sehingga dari fakta yang diperoleh dapat membayangkan bagaimana rupanya masa lampau itu (Moleong, 2007).

Tujuan data yang ada mampu untuk mengungkap permasalahan yang ada, sehingga akan diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang hendak disusun. Kemudian disusun menjadi satu rangkaian yang sistematis dan masuk akal.

Interpretasi dalam proses bertujuan untuk mendapatkan gambaran sejarah yang bersifat ilmiah, logis dan integrati dalam mencapai target, tergantung dari kemampuan peneliti, terutama dalam menuangkan kedalam tulisan.

4. Historiografi

Historiografi menjadi salah satu tahapan dalam menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif di masa lampau sesuai jejaknya. Tahapan historiografi merupakan tahapan kegiatan penulisan. Hasil penafsiran atas fakta-fakta itu di tulis menjadi suatu kisah sejarah yang selaras untuk ditulis.

Hasil

Pendidikan di OSVIA memberikan perubahan perkembangan di masyarakat Banten. Rakyat Banten dapat merasakan pendidikan yang bergaya Barat, siswa belajar membaca, menulis, berhitung, dan melaksanakan administrasi, ilmu hukum dan dapat menguasai bahasa Belanda maupun bahasa asing lainnya. Dengan demikian masyarakat Banten banyak yang menyekolahkan anaknya di sekolah OSVIA, mereka beranggapan bahwa dengan bersekolah di OSVIA dapat meningkatkan derajat keluarga agar dapat menjadi pegawai yang di hormati oleh rakyat Banten.

Tahun 1913 Pemerintah Kolonial Belanda membuat beberapa peraturan pengangkatan bupati isinya menyatakan, bahwa keturunan tidak menjadi syarat utama menjadi seorang bupati, Artinya tidak hanya anak atau kerabat bupati saja yang bisa menjadi pejabat tinggi Pangreh Praja. Syarat yang penting para calon bupati ini adalah pernah berdinasi dengan hasil kerja memuaskan selama dua tahun menjadi wedana serta mahir berbahasa Belanda, disertai pendidikan sekurangnyanya setingkat ijazah OSVIA (pendidikan kejuruan khusus

untuk para calon *ambtenar*). Ternyata peraturan ini tidak mudah, karena adanya kritikan dari elite priyayi dan bangsawan Banten yang mengajukan keberatan akan peraturan tersebut. Para elit Priyayi memberikan tanggapan bahwa peraturan bertentangan dengan asas pewarisan jabatan (Moleong, 2007).

Akan tetapi, hanya sebagian elite priyayi berpendidikan yang berani protes secara langsung. Ada yang melakukan protes dengan cara membuat tulisan dalam bentuk karya sastra. Sebaliknya reformasi pendidikan tentang aturan untuk menjadi bupati disambut gembira oleh para *amtenar* yang bukan keturunan Ningrat. Koran pribumi memberikan berita tentang masalah pro dan kontra tentang peraturan penghapusan asas pewarisan sehingga Pemerintah Kolonial mengubah peraturan tersebut tahun 1921 dengan menetapkan pengangkatan bupati baru berdasarkan asas keturunan, memenuhi persyaratan minimal lulusan OSVIA. Pemerintah Hindia Belanda menginginkan birokrasi modern untuk menekankan perekrutan para pejabat berdasarkan atas kualifikasi profesional, promosi atas asas senioritas, keahlian, dan prestasi. Di lain pihak birokrasi pribumi yang patrimonial menekankan perekrutan pejabat atas dasar hubungan kekerabatan antara para bupati. Terbukti dengan terjadinya pergeseran elite, kaum Ningrat dan Menak tidak lagi menjadi pemain utama dalam panggung politik di Banten. Terbukti setelah dibuka sekolah OSVIA menekankan bahwa pendidikan akan menjadi suatu prioritas pergantian sebuah rezim yang baru. Dampak lain dari bersekolah di OSVIA adalah para pelajarnya menunjukkan bahwa keluarga pegawai rendah atau bahkan ayahnya tidak bekerja di Pemerintahan Belanda dapat menyekolahkan anak di OSVIA tanpa memandang dari status sosial masyarakat.

Lulusan OSVIA membentuk sebuah paradigma baru tentang Pangreh Praja dan dipandang sebagai inti kepegawaian sipil modern di masa selanjutnya. Ini dapat dilihat dari para pejabat yang lebih tua dan kurang tinggi pendidikannya mulai pensiun maka lulusan OSVIA ini akan semakin menjadi ciri korps dan adanya pergeseran sosial di kalangan pelajar OSVIA memberi petunjuk bahwa Pangreh Praja di masa yang akan depan semakin berkurang sifat aristokratisnya.

Seiring dengan semakin dalamnya kekuasaan Kolonial, semakin kelihatan pula bahwa kaum Pangreh Praja yang terdiri dari para bupati dan aparatnya berperan sebagai perantara Pemerintah Kolonial dengan rakyat. Pangreh Praja menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Kolonial, rakyat merasa Pangreh Praja tidak berguna karena hak-hak Rakyat tidak pernah didengar bahkan Pangreh Praja hanya kepentingan Kolonial saja.

a. Penyebab Penutupan Sekolah OSVIA di Serang Banten Tahun 1927

Kebijakan politik reaksioner dari Pemerintah Belanda dengan adanya depresi ekonomi yang menimbulkan bangkrutnya para perusahaan swasta dan perkebunan serta Pemerintah Kolonial terpukul keras oleh krisis dan terpaksa melakukan penghematan. Penghematan yang pertama dimulai

dari pegawai pemerintahan. Pegawai dilihat sebagai pemborosan anggaran. Penghematan dilakukan dengan mengurangi jumlah gaji, bahkan pemberhentian pegawai.

Penyebab ditutupnya sekolah Pangreh Praja di Serang Banten karena adanya perluasan pendidikan yang ditentukan oleh kebutuhan pegawai dan juru tulis yang meningkat. Banyaknya perkebunan-perkebunan yang dimiliki oleh orang asing membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tetapi menjadikan masalah sosial baru di Banten karena ssbanyak masyarakat yang meninggalkan daerah asal dan pindah ke perkebunan Belanda. Pemerintah Belanda tidak dapat mengontrol rakyat yang semakin lama semakin banyak.

Kebutuhan akan tenaga pegawai pemerintah dan di perusahaan swasta membuat pendidikan barat semakin terbuka bagi orang pribumi. Kemajuan ekonomi disertai oleh perkembangan pendidikan depresi ekonomi membawa kemunduran pendidikan. Hal seperti ini dirasa bahwa kebutuhan pemerintah akan pegawai pribumi di daerah Banten sudah cukup. Pemerintah Belanda melakukan batasan pendidikan orang pribumi.

Kebutuhan pegawai yang mempunyai pendidikan lebih baik menyebabkan perluasan vertikal sistem pendidikan. Produksi berlebihan harus dicegah sebagai bahaya politik dan sosial, yang bisa mengancam eksistensi Pemerintahan Kolonial Belanda di kawasan Banten. *Holland's Inlandsch Onderwijs Commissie* (HIOC) atau Komisi Sekolah Belanda untuk rakyat Pribumi tahun 1927 menganjurkan agar jumlah sekolah di Hindia Belanda dikurangi.

Kebijakan HIOC menghasilkan beberapa jumlah sekolah di Hindia Belanda membawa dampak ke OSVIA di Serang ditutup oleh Pemerintah Belanda di tahun 1927 (ANRI, 1980). Selanjutnya pendidikan, gedung OSVIA digunakan oleh Sekolah Guru (*Normal School*). Setelah tahun 1949 gedung OSVIA digunakan sebagai tempat Markas Besar Polisi Serang sampai sekarang.

Tahun 1927 depresi ekonomi menyebabkan pemerintah menutup sekolah agar tidak banyak pengeluaran anggaran negara sehingga salah satu dampaknya yaitu keenam buah OSVIA bergabung menjadi empat MOSVIA tingkatannya yang lebih tinggi dan menerima lulusan sekolah menengah pertama menjadi murid, memberikan latihan pendidikan kejuruan selama tiga tahun pada siswa.

b. Perhimpunan Bekas OSVIA (*Oud Osvianen Bond* atau OOB)

Tanggal 1 Juli 1915 Pemerintah Kolonial membuat peraturan baru tentang pengangkatan dan kenaikan pangkat pejabat pribumi. Peraturan menetapkan persyaratan pendidikan bagi kedudukan di Pangreh Praja dan memperluas asas-asas tentang penghapusan sistem magang.

Pendidikan merupakan prioritas pertama, jika pendidikannya sama maka kesenioran akan menentukan pengangkatan seorang pegawai. Setiap tahun masing daerah di Residenan memilih pemuda dengan pendidikan yang sesuai yaitu lulusan OSVIA, HBS, HIS untuk menjadi seorang pegawai pribumi. Pemuda-pemuda menerima latihan praktek sebagai juru tulis yang dipekerjakan pada seorang pejabat tinggi (bupati, patih, kontrolir atau jaksa). Sebelum memangku jabatan, tanggung jawab pertama biasanya sebagai manteri polisi. Ini berarti bahwa mereka yang mempunyai syarat-syarat mencapai kedudukan khusus, setelah mereka memasuki dinas Pangreh Praja. Walaupun berdinas sebagai seorang juru tulis pembantu, pekerjaannya dilakukan dalam waktu singkat.

Petisi dan protes mengalir ke Batavia melalui sepucuk surat dalam bahasa Melayu, para Pangreh Praja merasa dirugikan, diberlakukannya peraturan semenjak tahun 1915 berkaitan dengan sebuah peraturan penghapusan sistem magang, yang diganti dengan kenaikan pangkat. Para lulusan OSVIA merasa kecewa terhadap sistem yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial, karena lulusan OSVIA disejajarkan dengan lulusan HIS, sedangkan dari lulusan HBS menuntut agar diperlakukan secara khusus. Tetapi keputusan sudah diambil sehingga Batavia tidak akan mengubahnya.

Penghapusan sistem magang dan diberlakukannya sebuah rancangan kenaikan pangkat pada tahun 1915 memperkenalkan suatu sistem yang terstandardisasi dan berorientasi pada efisiensi untuk menyalurkan pejabat pribumi kepada hirarki pemerintahan. Dua tonggak utama pemerintahan tradisional tetap akan pertahankan, dalam bentuk yang agak kurang menyolok. Preferensi keturunan tinggi masih merupakan asas dasar dan priyayi pegawai negeri sangat tergantung pada penilaian pribadi dari BB dan bupati.

Peraturan tentang hal kenaikan pangkat tahun 1915 menimbulkan ketidakpuasan dari lulusan yang memiliki pendidikan lebih tinggi sehingga para pegawai Pangreh Praja lulusan OSVIA melakukan protes kepada Pemerintah Kolonial di Batavia akhirnya akan menimbulkan ketegangan dalam korp Pangreh Praja diperkuat oleh pembentukan sebuah perhimpunan priyayi baru tahun 1916. Perhimpunan Priyayi membatasi

keanggotaan lulusan OSVIA dan bertujuan memperbaiki kedudukan para pejabat yang lulusan OSVIA.

Lulusan OSVIA menghasilkan organisasi yang bernama *Oud Osvianen Bond* (Perhimpunan bekas OSVIA) atau OOB. Tujuan OOB adalah memperbaiki mentalitas dari Pangreh Praja serta para pejabat pemerintahan di daerah desa, untuk menggugah rasa kehormatan diri di kalangan priyayi serta melawan berbagai keburukan yang terdapat di dalam korp, seperti: sikap pasif, bermewah-mewah, beristri banyak, sikap menjilat serta dipaksakan, termasuk pemberian penghormatan yang berlebih-lebihan oleh orang-orang asing (Sutherland & Sunarto, 1983).

Reformasi diterapkan tentang kenaikan pangkat pegawai Pangreh Praja tahun 1915 ditujukan untuk memodernisasi Pangreh Praja tanpa mencairkan kepribumiannya atau sifat aristokratnya. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemerintahan efisien dan mampu untuk mempertahankan pengaruh pribadi corak lama kaum priyayi atas rakyat. Pameran Praja Korp terbagi menjadi beberapa kelompok kepentingan berdasarkan pendidikan yang saling bersaing kelompok konservatif melawan kelompok pembaharu. Keyakinan diri dan solidaritas intern Pangreh Praja mulai goyah tepat pada saat ketika berada dalam bahaya akan kehilangan ide terhadap organisasi-nasional yang menampilkan diri sebagai pelindung (*Patron*) rakyat untuk melawan persekutuan priyayi Belanda yang bersifat memeras.

Simpulan

Awal abad ke-19 Pemerintah Kolonial Belanda membagi-bagi wilayah jajahannya atas beberapa Keresidenan. Setiap Keresidenan terbagi atas beberapa Kabupeten. Bupati dianggap sebagai keturunan raja yang pernah berkuasa pada masa kerajaan Islam terdahulu. Dalam birokrasi Kabupaten yang dikenal sebagai birokrat adalah Pangreh Praja. Bupati membawahi aparat yang terdiri atas Patih, Wedana, Asisten Wedana, Jaksa Kepala, Para Mantri dan Juru tulis.

Sistem birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda menganggap penting peranan elite politik pribumi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah. Titik tolak perhatian mereka dalam menentukan seorang bupati adalah pejabat yang duduk dalam posisi tertinggi jajaran birokrasi. Pribumi harus menjadi orang elite politik yang sanggup menjadi perantara (*Middleman*) antara pemerintah dan rakyat dengan menggunakan otoritas tradisional dimilikinya. Otoritas ini hanya dimiliki oleh keturunan raja-raja atau pembesar yang diakui oleh rakyat. Tidak mengherankan apabila

Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke 19 hingga awal abad ke 20 menggunakan berbagai peraturan yang dapat menjamin kelancaran politik, antara lain mengharuskan para calon elite birokrasi pribumi untuk membuat daftar silsilah.

Daftar Silsilah ini secara tidak langsung merupakan salah satu penjamin posisi otoritas tradisional yang dimiliki calon apabila dalam daftar silsilah terdapat tokoh terkemuka yang dihormati oleh rakyat.

Pemerintah Kolonial lebih suka mendekati serta memilih para administrator aristokrat dan semua bangsawan serta para pemimpin yang sukar diajak untuk berdamai. Hal itu dilakukan dengan cara mengangkat, menjadikan mereka sebagai pegawai dalam kedudukan pemerintahan. Namun tidak semua mengikuti Pemerintah Kolonial. Justru banyak bangsawan dan rakyat yang kurang senang dengan tindakan tersebut, telah banyak terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah di Banten.

Sistem birokrasi diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bersifat dualistik mengakibatkan terjadinya paradoks. Di satu sisi terdapat sistem birokrasi disaring berdasarkan kriteria modern. Sisi lain masih tetap dipertahankannya sistem tradisional melalui magang. Magang merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka rekrutmen Pangreh Praja. Melalui magang yang bersifat feodalistik diharapkan melahirkan para pejabat yang memiliki loyalitas tinggi terhadap atasan. Hal ini boleh jadi merupakan suatu strategi yang sengaja mendukung terwujudnya suatu *Beamtenstaat*, yakni sebuah Negara *Apolitik* dimana politik pertama-tama sebagai sebuah alat untuk benar-benar mewujudkan suatu pemerintahan yang kokoh, bukannya alat untuk mewujudkan tuntutan sosial yang bersaing.

Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi pada awal abad ke 20, akibat diperkenalkannya sistem pendidikan Barat, bangsa Kolonial Belanda melakukan reformasi di bidang birokrasi. Pada tahun 1915, prinsip warisan jabatan dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan asas-asas birokrasi modern yang legal-rasional sehingga keturunan tidak menjadi syarat utama untuk calon Bupati. Artinya bukan hanya anak atau kerabat bupati saja bisa menjadi pejabat tinggi Pangreh Praja. Syarat penting bagi para calon ini adalah sudah dua tahun menjadi Patih atau Wedana, minimal lulusan OSVIA (pendidikan kejuruan khusus untuk para calon amtenar). Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan sekolah lanjutan untuk mendidik ahli-ahli administrasi pribumi yang diberikannya *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)*. Dimana standar untuk menjadi seorang bupati minimal lulusan OSVIA dan mampu berbahasa Belanda.

Usmaedi

Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi Untuk Pangreh Praja (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren-Osvia) Di Serang – Banten Tahun 1900 – 1927

Pendidikan OSVIA merupakan mimpi anak-anak priyayi untuk dapat duduk dalam birokrasi di Pangreh Praja, masyarakat Banten banyak menyekolahkan anaknya ke OSVIA. Harapannya anak dari pejabat tersebut dapat melanjutkan kepemimpinan orang tua maupun kakek mereka, agar status menjadi Ningrat tetap melekat, dihormati Pemerintah Belanda dan rakyat biasa.

Daftar Rujukan

- ANRI. (1980). *Memori Serah Jabatan 1931-1940 Jawa Barat No.11* (pp. LXI–LXII). pp. LXI–LXII. Jakarta.
- Burke, P. (2001). *Sejarah dan teori sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Departemen Kebudayaan dan, P. (2006). *Laporan kegiatan pemetaan, penggambaran, dan pembobotan bangunan gedung Mapolres Serang*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. (N. Notosusanto, Trans.). Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notosusanto, N., & Poesponegoro, M. D. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sutherland, H., & Sunarto. (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Van der Wal, S. L. (2001). *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda, 1920-1942*. Jakarta: Penerbit Djambatan, Terjemahan.
- Widja, I. G. (1988). *Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Jakarta: Satya Wacana.